



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. (0275) 321012 Faks. (0275) 322791
Pos-mail: setda@purworejokab.go.id Laman:
www.setda.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 100-3.2/564/2025

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

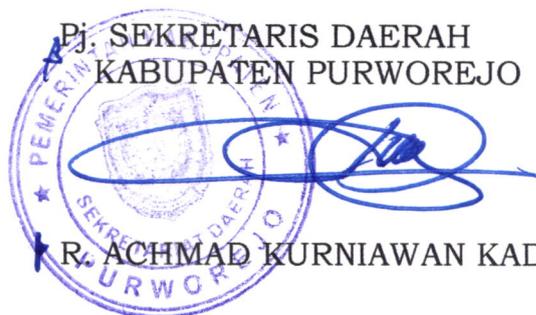
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perencanaan Penyusunan Peraturan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan yang ditampung dalam Perubahan Perencanaan Penyusunan Peratruran Kepala Daerah.
- KETIGA : Perubahan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan apabila ada usulan baru rancangan Peraturan Kepala Daerah yang belum tercantum dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Usulan baru rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat dicantumkan kedalam Perubahan Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah apabila :
1) bersifat mendesak;
2) ada perubahan regulasi di atasnya yang mengharuskan Peraturan Kepala Daerah yang sudah ada untuk diubah/disesuaikan;
3) terbit regulasi baru di atasnya yang mengamanatkan pengaturan teknisnya kedalam Peraturan Kepala Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 100.3.2/564/2025
 TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN
 PERATURAN KEPALA DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

NO	JUDUL RAPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PEMRAKAR SA	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENETAPAN
			BARU	UBAH				
1.	Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.	Penyesuaian terhadap Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Baru		Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.	Bagian Organisasi Setda	1. BKPSDM 2. Inspektorat 3. Bagian Hukum Setda	

2.	Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Publik b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik c. Standar Pelayanan d. Maklumat Pelayanan e. Pengaduan Layanan f. Survey Kepuasan Masyarakat g. Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional h. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik i. Sarana dan Prasarana 						
----	--	--	--	--	--	--	--	--

		Pelayanan Publik j. Kode Etik, Hak, dan Kewajiban Penyelenggara Pembinaan dan Pengawasan k. Evaluasi dan Pelaporan						
3.	Budaya Kerja	Penyesuaian Budaya Kerja Berakhlak	Baru				1. BKPSDM 2. Inspektorat 3. Bagian Hukum	Semester I
4.	Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo		Baru		Penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.		1. BKPSDM 2. Bagian Hukum	Semester I

5.	Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo		Baru		Penyesuaian terhadap Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.		<ol style="list-style-type: none"> 1. BKPSDM 2. Bagian Hukum 	Semester I
6.	Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo.		Baru		Penyesuaian terhadap Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.		<ol style="list-style-type: none"> 1. BKPSDM 2. Bagian Hukum 	Semester I

7.	Pembentukan UPTD Rumah Kemas pada Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo.	Membentuk UPTD Rumah Kemas dibawah Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo.	Baru			Bagian Organisasi	1. BKPSDM 2. Bagian Hukum	Semester I
8.	Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.	<p>a. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.</p> <p>b. Pembinaan dan Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.</p> <p>c. Obyek dan Tindak Lanjut Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara</p>	Baru			Inspektorat	Bagian Hukum Setda	Desember

		<p>an Pemerintahan Daerah. d. Laporan e. Pendanaan.</p>						
9.	<p>Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyampaia n Laporan Harta Kekayaan Penyelengga ra Negara DiLingkung an Pemerintah Kabupaten Purworejo.</p>	<p>a. Maksud tujuan b. Wajib Lapo r LHKPN c. Penyampaian LHKPN d. Sistem e- LHKPN e. Tim Pengelola LHKPN f. Sanksi Administratif g. Ketentuan penutup</p>		Ubah		Inspektorat	Bagian Hukum Setda	Maret

10.	Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan /Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.	<ul style="list-style-type: none"> a. Maksud tujuan b. Ruang lingkup c. Klien pengawasan d. Koreksi intern e. Mekanisme dan pelaksanaan tindak lanjut f. Tindak Injut LHP BPK g. Tindak lanjut LHP APIP h. Pelaksanaan TLHP i. Pemanatauan dan Pembahasan TLHP j. Status TLHP k. Monitoring l. Penatausahaa n m. Sanksi n. Ikhtisar hasil pengawasan 	Baru			Inspektorat	Bagian Hukum Setda	Juni
-----	---	--	------	--	--	-------------	--------------------	------

11.	Penataan dan Pemberdayaan PKL	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan lokasi binaan dan lokasi yang tidak diperuntukkan bagi PKL b. Penyusunan rencana aksi penataan PKL c. Pemberdayaan PKL d. Pengendalian dan kepastian hukum PKL yang belum memiliki izin e. Pencabutan NIB f. Kemitraan penetapan lokasi binaan. g. Penetapan zona hijau, kuning, merah h. Kelengkapan papan nama lokasi atau rambu dan larangan zona, 	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2024	DINKUKMP	<ul style="list-style-type: none"> 1. DINPMPTSP 2. Satpol PP 3. DINPUPR 4. DINHUB 5. DLHP 6. Bagian Hukum 7. Bagian Pemerintahan 8. Bagian Perekonomian 9. Camat 	Desember
-----	-------------------------------	---	------	--	--	----------	---	----------

		<p>waktu operasional, sertabat PKL</p> <p>i. Pembangunan lokasibinaan, penyediaan aksesabilitas, biaya perawatan, sarana prasarana, fasilitas penunjang lokasi binaan</p> <p>j. Tata Cara permohonan SKPP</p> <p>k. Peremajaan lokasi PKL</p> <p>l. Hak PKL</p> <p>m. Sanksi administrative</p> <p>n. Pembinaan PKL</p> <p>o. Pengawasan PKL</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

12.	Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari DBHCHT			Ubah				
13.	Penanggulangan Kemiskinan Daerah			Ubah				
14.	Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan tujuan 3. Pembentukan dan kedudukan 4. Tugas dan Fungsi 5. Susunan Organisasi 6. Pengukuhan, masa jabatan, pemberhentian 	Baru		Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinkes 2. Dindikbud 3. DPPPAPMD 4. DPUPR 5. Disdukcapil 6. Bagian Hukum 	Semester I

		<p>dan penggantian anggota</p> <p>7. Pengambilan Keputusan</p> <p>8. Ketentuan Penutup</p>						
15.	<p>Penyelengga raan Kesejahtera an Sosial LanjutUsia</p>	<p>1. Ketentuan Umum</p> <p>2. Penyelenggara an Kesejahteraan Lanjut Usia</p> <p>3. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual</p> <p>4. Pelayanan Kesehatan</p> <p>5. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan</p> <p>6. Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan</p>						

		dan masyarakat						
		7. Penyediaan fasilitas dan aksesabilitas sarana dan prasarana umum						
		8. Pemberian bantuan sosial						
		9. Perlindungan sosial						
		10. Pemberdayaan lanjut usia						
		11. Pemberian penghargaan						
		12. Pembinaan dan pengawasan						
		13. Pemberian sanksi administrative						
		14. Pendanaan						
		15. Ketentuan Peralihan						
		16. Ketentuan Penutup						

16.	Penjabaran Pertanggung jawaban APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi APBD 2. Ringkasan Laporan Realisasi APBD 3. Perincian Penjabaran Laporan Realisasi APBD 	Baru		Perda tentang Pertanggungjawa ban APBD	BPKPAD	Semua Perangkat Daerah	Agustus
17.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Perubahan Lampiran III Bagan Akun Standar menyesuaikan dengan Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023.		Ubah	Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur	BPKPAD	Semua Perangkat Daerah	Desember

					Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.			
18.	Petunjuk Pelaksanaan APBD TA 2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pelaksanaan dan Penatausahaan 4. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD 5. Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah 6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7. Kekayaan 	Baru		Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	BPKPAD	Semua Perangkat Daerah	Desember

		Daerah 8. Badan Layanan Umum Daerah.						
19.	Penjabaran APBD TA 2026.	Penjabaran terdiri atas : a. Pendapatan daerah 1) PAD 2) Pendapata n transfer 3) Lain2 pendapata n daerah yg sah b. Belanjadaerah 1) Klasifikasi menurut kelompok, jenis,obyek dan rincian obyek, pendapata n, belanja dan pembiaayaa n. 2) Klasifikasi urusan	Baru		Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD	Semua Perangkat Daerah	Desember

		<p>pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek, penadapat an, belanja dan pembiayaa n.</p> <p>c. Pembiayaan</p> <p>1) Penerimaan pembiayaan</p> <p>2) Pengeluaran pembiayaan</p> <p>d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

20.	Analisis Standar Belanja TA 2026	ASB Perangkat Daerah	Baru		Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	BPKPAD	Semua Perangkat Daerah	Mei
21.	Penjabaran Perubahan APBD TA 2025	Penjabaran rinci atas perubahan : a. Pendapatan Daerah 1) PAD 2) Pendapatan transfer 3) Lain-lain pendapatan yg sah b. Belanja Daerah 1) Klasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan,						

		<p>belanja dan pembiayaan</p> <p>2) Klasifikasi urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja</p> <p>c. Pembiayaan</p> <p>1) Penerimaan pembiayaan</p> <p>2) Pengeluaran pembiayaan</p> <p>d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		informasi.						
22.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman pengelolaan Belanja Tidak terduga pada APBD Kabupaten Purworejo.	Perubahan Pasal menyesuaikan dengan kondisi perkembangan terbaru		Ubah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD	Semua Perangkat Daerah	Juli
23.	Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2027	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegunaan SHSBJ 2. Prinsip 3. Izin Bupati untuk penggunaan harga pasaran diatas SHSBJ 4. Persetujuan Bupati untuk penggunaan harga pasaran bagi 	Baru		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pasal 49 ayat (3) Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 	BPKPAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPKPAD 2. DPUPR 3. Dinkes 4. Bagian Hukum 5. Bagian Umum 6. Semua PD 	Desember

		<p>kebutuhan barang/jasa yang bersifat mendadak yg harganya belum tercantum dalam SHSBJ</p> <p>5. Mekanisme penerbitan izin dan persetujuan Bupati</p> <p>6. Tabel SHSBJ</p>			Keuangan Daerah.			
24.	<p>Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2025</p>	<p>1. Perubahan terhadap Lampiran I</p> <p>2. Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium</p> <p>3. Tabel 1.4 Satuan Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri</p> <p>4. Tabel 1.8 Satuan Biaya Pengadaan</p>						

		<p>Kendaraan dinas pejabat</p> <p>5. Tabel 1.9 Satuan Biaya Pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4</p> <p>6. Tabel 1.10 Satuan Biaya Pengadaan kendaraan operasional Bus</p> <p>7. Tabel 1.11 Satuan Biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2</p> <p>8. Perubahan terhadap Lampiran II</p> <p>9. Tabel 2.2 Satuan Biaya tiket Pesawat udara</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>perjalanan dinas dalam negeri PP</p> <p>10. Tabel 2.3 Satuan Biaya Taksi perjalanan dinas dalam negeri</p> <p>11. Tabel 2.8 Satuan Biaya pemeliharaan kendaraan dinas pejabat</p> <p>12. Satuan Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional.</p>						
25.	Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata	<p>a. Pencanaan, penilaian dan penetapan desa wisata</p> <p>b. Organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan desa wisata.</p>	Baru			Dinporapar		

26.	Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif b. Fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual c. Rencana Aksi ekonomi kreatif d. Komite ekonomi kreatif e. Fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan alternative diluar mekanisme f. Pemberian penghargaan 	Baru			Dinporapar		
27.	Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2024 tentang	<ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama 	Baru			Dinporapar		

	Penyelenggaraan Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga c. Industri olahraga d. Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan. 						
28.	Penggunaan tandatangan elektronik Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan sertifikatel elektronik b. Persyaratan tandatangan elektronik c. Identifikasi, autentifikasi dan verifikasi tandatangan elektronik d. Penggunaan pemilik sertifikat elektronik e. Sanksi f. Kewajiban 		Ubah		Dinkominfo tasandi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Setda 2. Bagian Organisasi Setda 3. BPKPAD 4. BKPSDM 	April

		dan larangan g. Pembiayaan h. Peralihan						
29.	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknik dan Standar Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	a. Penetapan ruang lingkup b. Penanggungja wab c. Perencanaan d. Dukungan pengoperasian e. Evaluasi kinerja f. Perbaikan berkelanjutan		Ubah		Dinkominfos tasandi	1. Bagian Hukum Setda 2. Bagian Organisasi Setda 3. BPKPAD 4. BKPSDM	Mei
30.	Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Arah kebijakan internal b. Tujuan penerapan c. Pihak2 yang berkepentingan	Baru			Dinkominfos tasandi	1. Bagian Hukum Setda 2. Bagian Organisasi Setda 3. BPKPAD 4. BKPSDM	Juni

		d. Strategi pelaksanaan e. Sumberdaya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen SPBE.						
31.	Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Kerangka kerja manajemen risiko b. Proses manajemen risiko SPBE c. Struktur manajemen dan budaya sadar risiko SPBE	Baru			Dinkominfo tasandi	1. Bagian Hukum Setda 2. Bagian Organisasi Setda 3. BPKSDM 4. Bappedalitbang	Juni
32.	Tata Cara PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah	Berdasarkan info dari Kementerian, aka nada perubahan Permendikbud terkait pengaturan		Ubah	Permendikbud tentang PPDB TA 2025/2026	Dindikbud	1. DinsosdaldukKB 2. Dinkominfo tasandi 3. Disdukcapil 4. Dinporapar	April

	Menengah Pertama.	zonasi.						
33.	Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan di Desa dan Kelurahan.	Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan melalui petugas registrasi desa/kelurahan dengan menggunakan SIAK	Baru			Disdukcapil	1. Asisten I 2. Dinkominfo sandi 3. DP3APMD 4. Kecamatan 5. Desa/Kelurahan	Juni
34.	Tata Kelola pada BLUD RSUD dr.Tjitrowar dojo Kabupaten Purworejo.	a. Organisasi pemilik atau yang mewakili b. Peran, tugas dan kewenangan Direktur Rumah Sakit. c. Organisasi staf medis. d. Peran, tugas dan kewenangan staf medis.		Ubah	1. Pasal 38 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. 2. Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan sakitan.	RSUD dr.Tjitrowar dojo	1. Dinkes 2. Bagian Hukum Setda	
35.	Remunerasi pada BLUD RSUD	a. Penerimaan remunerasi		Ubah	Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun	RSUD dr.Tjitrowar dojo	1. Dinkes 2. BPKPAD 3. Bagian Hukum	

	dr.Tjitrowar dojo Kabupaten Purworejo.	b. Komponen remunerasi c. Pendanaan dan penganggaran			2018 tentang BLUD.		Setda.	
36.	Pengelolaan BLUD RSUD dr.Tjitrowar dojo	a. Pelaksanaan anggaran BLUD b. Tata Cara Penghapusan Piutang c. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek. d. Pengelolaan investasi BLUD. e. Pengelolaan SILPA BLUD. f. Kebijakan akuntansi BLUD.		Ubah	Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.	RSUD dr.Tjitrowar dojo	1. Dinkes 2. BPKPAD 3. Bapperida 4. Bagian Hukum Setda 5. Bagian Adbang Setda	
37.	Rencana Bisnis Anggaran	a. Penyusunan b. Pengajuan c. Penetapan	Baru			RSUD dr.Tjitrowar dojo	1. Dinkes 2. BPKPAD 3. Bapperida	

	pada BLUD Bidang Kesehatan.	d. Perubahan RBA BLUD					<ul style="list-style-type: none"> 4. RSUD RAA Tjokronegoro 5. Bagian Hukum Setda 6. Bagian Adbang Setda 7. Puskesmas Kemiri 	
38.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada BLUD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemungutan retribusi. b. Pengelolaan tempat khusus parkir c. Penyetoran penerimaan retribusi. d. Penetapan lokasi e. Tempat khusus parkir f. Sanksi 	Baru		Pasal 71 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.		<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinhub 2. BPKPAD 3. Bagian Hukum Setda 4. Bagian Kesra Setda 5. Bagian Perekonomian dan SDA Setda 	

39.	Perencanaan Strategis pada BLUD RSUD dr. Tjitrowar dojo Kabupaten Purworejo.	<ul style="list-style-type: none"> a. Program perencanaan kegiatan 5 tahun kedepan. b. Pendanaan indikatif 	Baru		Pasal 41 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.		<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinkes 2. Bapperida 3. Bagian Hukum Setda 	
40.	Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Pariwisata Otoritatif BOB	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan penataan WP b. Rencana struktur ruang c. Rencana pola ruang d. Ketentuan pemanfaatan ruang e. Peraturan zonasi f. Kelembagaan 	Baru		1. Pasal 69 ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041	DPUPR	<ul style="list-style-type: none"> 1. BPKPAD 2. Bapperida 3. DINPMPTSP 4. DLHP 5. Dinperkimtan 6. Dinhub 7. Dinporapar 8. Dindikbud 9. DKPP 10. BPBD 11. Satpol PP Damkar 12. DINKUKMPO 13. Dinperintransnaker 14. Dinkominfo 15. DPPAPMD 16. Dinkes 	

						<ul style="list-style-type: none"> 17. Bagian Pembangunan Setda 18. Bagian Hukum Setda 19. Kecamatan Lonao 20. Kecamatan Bener 21. Kecamatan Kaligesing. 	
41.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kemiri-Pituruh	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan penataan WP b. Rencana Struktur ruang c. Rencana Pola ruang d. Ketentuan pemanfaatan ruang e. Peraturan zonasi f. Kelembagaan 	Baru		Pasal 69 ayat (2) huruf g Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041.	<ul style="list-style-type: none"> 1. BPKPAD 2. Bapperida 3. DINPMPTSP 4. DLHP 5. Dinperkimtan 6. Dinhub 7. Dinporapar 8. Dindikbud 9. DKPP 10. BPBD 11. Satpol PP Damkar 12. DINKUKMP 13. Dinperintransnaker 14. Dinkominfo 15. DPPPAPMD 	

							16. Dinkes 17. Bagian Pembangunan Setda 18. Bagian Hukum Setda 19. KecamatanKutoar jo 20. Kecamatan Kemiri 21. Kecamatan Pituruh 22. Kecamatan Butuh.	
42.	Inovasi Daerah.	a. Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah b. Uji Coba Inovasi Daerah c. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah.	Baru		1. PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. 2. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.	Bapperida	Semua Perangkat Daerah	Mei
43.	Perubahan Atas	a. Prinsip Satu Data		Ubah	1. PP Nomor 39 Tahun 2019	Bapperida	Semua Perangkat Daerah.	Juni

	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 192 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Purworejo.	<p>Kabupaten Purworejo.</p> <p>b. Jenis data</p> <p>c. Penyelenggara satu data Kabupaten Purworejo.</p> <p>d. Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo.</p> <p>e. Forum Satu Data Kabupaten Purworejo</p> <p>f. Kerja sama</p> <p>g. Pendanaan</p>			<p>tentang Satu Data Indonesia.</p> <p>2. Permen Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.</p> <p>3. Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.</p> <p>4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.</p>			
44.	Rencana Kerja	a. Gambaran umum kondisi	Baru		Permendagri Nomor 86 tahun	Bapperida	Semua Perangkat Daerah	Juni

	Pemerintah Daerah Tahun 2026.	<p>daerah</p> <p>b. Gambaran ekonomi dan keuangan daerah</p> <p>c. Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>d. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>e. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>			2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Jangka Panjang Daerah dan Rencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.			
45.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah	<p>a. Evaluasi hasil triwulan II Tahun berkenaan.</p> <p>b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah</p> <p>c. Sasaran dan prioritas</p>		Ubah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi	Bapperida	Semua Perangkat Daerah	Juli

Daerah Tahun 2025.	pembangunan daerah d. Rencana kerja dan pendanaan daerah e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.			Rancangan Peraturan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka			
--------------------	--	--	--	---	--	--	--

					Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.			
46.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026.	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Evaluasi RKPD Tahun lalu b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. 	Baru		Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Jangka Panjang Daerah dan Rencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Bapperida	Semua Perangkat Daerah	Juli

47.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Renja s/d Triwulan III tahun berkenaan b. Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah. 		Ubah	Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Jangka Panjang Daerah dan Rencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Bapperida	Semua Perangkat Daerah	Agustus
48	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi umum daerah b. Profil kemiskinan daerah 	Baru		1. Perpres Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan ercepatan Penanggulangan Kemiskinan.	Bapperida	Semua Perangkat Daerah	Agustus

		<p>c. Prioritas program</p> <p>d. Lokasi prioritas.</p>			<p>2. Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.</p>			
49.	Rencana Strategis	a. Gambaran pelayanan	Baru		Permendagri Nomor 86 tahun	Bapperida	Bapperida	September

	Bapperida Tahun 2025-2029	Perangkat Daerah b. Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah c. Tujuan dan sasaran d. Strategi dan arah kebijakan e. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan			2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Jangka Panjang Daerah dan Rencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.			
50.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2024	1. Sanksi Administratif 2. Sinergitas	Baru		Pasal 14 ayat (3) dan pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.	DPMPTSP	1. DLHP Kabupaten Purworejo 2. DPUPR Kabupaten Purworejo 3. DINKES Kabupaten Purworejo 4. DINKUKMP Kabupaten Purworejo	November

	tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal						5. Bappedalitbang Kabupaten Purworejo. 6. BPKPAD Kabupaten Purworejo. 7. Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo.	
51.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelimpahan Kewenangan 2. Jenis-Jenis Pelayanan 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Perizinan Non Berusaha 5. Nonperizinan 6. Pelayanan Secara Elektronik. 7. Penandatanganan Dokumen Perizinan 	Baru		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	DPMPTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP Kabupaten Purworejo 2. DLHP Kabupaten Purworejo 3. DPPUPR Kabupaten Purworejo 4. DINKES Kabupaten Purworejo 5. DINHUB Kabupaten Purworejo 6. DKPP Kabupaten Purworejo 7. DINDIKBUD Kabupaten Purworejo 8. DINPUSIP Kabupaten Purworejo. 	November

							<p>9. DINPORAPAR Kabupaten Purworejo</p> <p>10. DINPERINTRASNA KER Kabupaten Purworejo</p> <p>11. DINKUKMP Kabupaten Purworejo</p> <p>12. DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo</p> <p>13. BPKPAD Kabupaten Purworejo</p> <p>14. SATPOL PP DAMKAR Kabupaten Purworejo.</p> <p>15. Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

